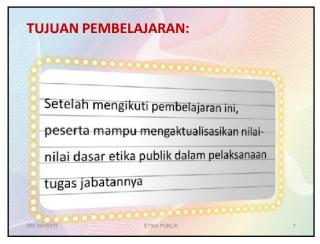


Mata diklat ini memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar etika publik pada peserta Diklat melalui pembelajaran kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik, penerapan kode etik PNS, beserta analisis dampaknya.

 Mata Diklat disajikan melalui pembelajaran berbasis pengalaman langsung (experiential learning), dengan penekanan pada proses internalisasi nilai-nilai dasar tersebut, melalui kombinasi metode ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan menonton film pendek.

 Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya mengaktualisasikan nilai-nilai dasar etika publik dalam pelaksanaan tugas jabatannya

3









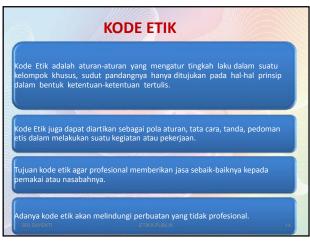


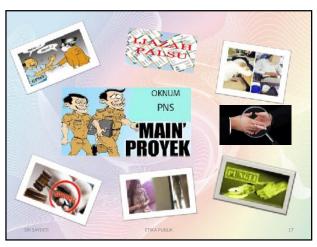


9 12









14 17





15 18







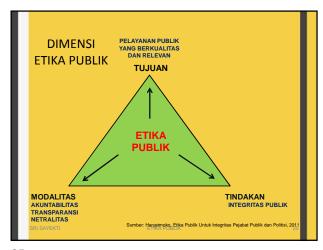


20 23





21 24









26 29





27 30



SUMBER PENYEBAB KONFLIK KEPENTINGAN

Kekuasaan dan kewenangan penyelenggara negara yang diperoleh dari perundang-undangan.

Perangkapan jabatan, yaitu seorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan publik, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel

Hubungan afiliasi (hubungan darah, hubunan perkawinan, maupun hubungan pertemanan) yang dapat mempengaruhi keputusannya.

Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas (pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, ticket perjalanan, fasilitas penginapan, dll.)

(KPK, Panduan Penanganan Konflik Kepentingan baggi Penyelenggara Negara)

31 34

TINDAKAN YANG MASUK DALAM KATEGORI KONFLIK KEPENTINGAN: □Ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi atau perusahaan swasta untuk keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan jabatan kedinasan. □Menerima segala bentuk hadiah dari pihak swasta pada saat ia melaksanakan transaksi untuk kepentingan kedinasan atau kepentingan pemerintah. Membicarakan masa depan peluang kerja di luar instansi pada saat ia berada dalam tugas-tugas sebagai pejabat pemerintah. Membocorkan infrormasi komersial atau ekonomis yang bersifat rahasia kepada pihak-pihak yang tidak berhak. □Terlalu erat berurusan dengan orang-o<mark>rang di luar</mark> instansi pemerintah yang dalam menjalankan bisnis pokoknya tergantung kepada izin pemerintah (Paul Douglas, 1993:61)

FILM SEBUAH PILIHAN
SI BUDI

• Refleksikan nilai-nilai etika dalam film tersebut
• Apa yang boleh dan apa yang tidka boleh dalam film tersebut?

32 35

BENTUK-BENTUK KONFLIK KEPENTINGAN

Situasi dimana seorang penyelenggara negara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu, misal dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya

Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur, karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.

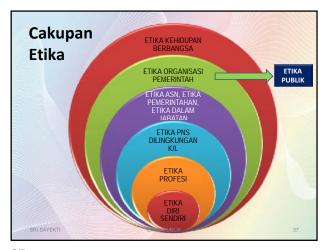
Situasi dimana seorang penyelenggara negara menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi

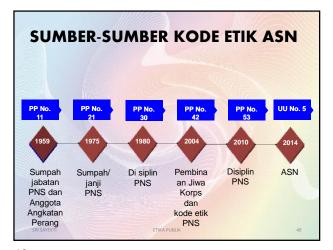
Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang mengalahgunakan wewenang.

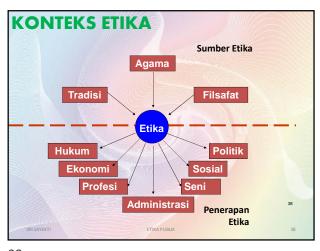
(KPK,Panduan Penanganan Konflik Kepentingan baggi Penyelenggara Negara)



33 36

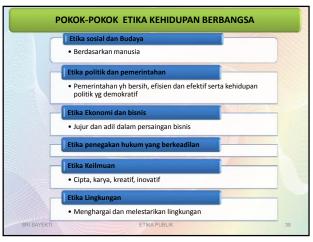


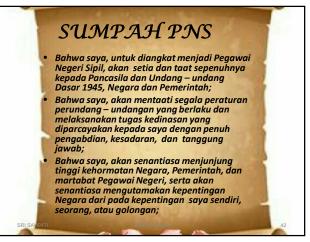






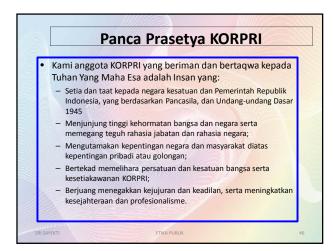
38 41





39 42









44 47

Membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan PNS.

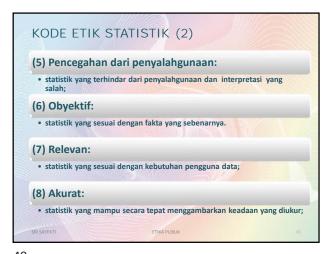
 Mendorong etos kerja PNS untuk mewujudkan PNS yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, dan abdi masyarakat;

 Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan PNS sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI

 MENERETI ETIKAPUBUK 45

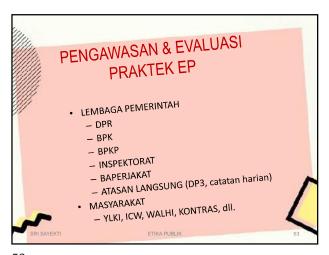


45 48

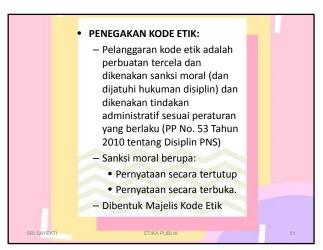








50 53





51 54







